BAB I

PENDAHULUAN

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Dalam percaturan dunia, hubungan antar bangsa merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Latar belakang terjadinya hubungan antar bangsa yaitu, adanya keinginan bersama untuk menciptakan perdamaian dunia yang jauh dari pertentangan, peperangan dan konflik yang berkepanjangan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan maupun dalam bidang-bidang lainnya. Hal lainnya yang mendasarai hubungan tersebut adalah adanya tuntutan dan keharusan tiap-tiap negara untuk selalu berhubungan dan bekerjasama dengan negara lainnya dalam memenuhi setiap kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa adanya bantuan dari negara lain[[1]](#footnote-1).

Hubungan antar bangsa lebih dikenal dengan hubungan internasional, yang dewasa ini mengalami perkembangan yang amat pesat, seiring dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Pada waktu sekarang Hubungan Internasional dijadikan sebagai sarana pencapaian tujuan nasional negara-negara di dunia. Dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam negerinya di segala bidang kehidupan. Inti dari hubungan internasional dalam teori ini adalah kerjasama antar bangsa baik kerjasama ekonomi, politik, sosial budaya, keamanan, dan lain-lain[[2]](#footnote-2).

Di dalam situasi dunia yang semakin mengglobal, isu-isu yang terdapat dalam politik internasional tidak lagi hanya sebatas pada isu politik, keamanan dan perdamaian saja, tetapi juga mulai timbul isu-isu lain yang dapat mempengaruhi masa depan bumi ini. Isu-isu yang mulai muncul tersebut, diantaranya adalah yang menyangkut masalah ancaman yang bersifat tradisional dan non-tradisional seperti terorisme, narkotika, HAM, kriminalitas, kelaparan, dan lain-lain.

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari isu-isu tersebut karena bila dilihat dari letak geografisnya Indonesia merupakan negara yang sangat strategis dan juga merupakan negara kepulauan, yang memungkinkan negara lain dapat dengan mudah masuk wilayah Indonesia, baik melalui laut, darat, maupun udara. Sehingga diperlukan suatu pengawasan oleh pemerintah Indonesia untuk menghindari terjadinya isu-isu tersebut di wilayah Indonesia, selain itu pemerintah Indonesia harus melakukan suatu bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan dengan negara lain yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Indonesia.

Pertahanan keamanan negara sebagai sebuah sistem bukan hanya monopoli atau ciri khas Indonesia, dan juga bukan hanya domain TNI dan Polri. Sistem pertahanan keamanan Negara (Sishankamneg) merupakan hal universal, di mana semua negara menggunakan, meskipun dengan istilah dan cara yang berbeda. Untuk itu terlebih dahulu perlu ada kesamaan pandang tentang wawasan Hankamneg bila ingin diterapkan dalam konteks masa depan. Terlebih bila dijadikan perspektif tatanan sosial masyarakat modern. Seperti diketahui bahwa posisi dan peran TNI/Polri telah mendapat legitimasi formal melalui kesepakatan bangsa dalam ST MPR 2000 yang lalu, utamanya melalui Tap Nomor VI danVII/MPR/2000.

Tap MPR RI No.VI tahun 2000 menegaskan bahwa pemisahan antara TNI dan Polri adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari lagi oleh negara dan hal ini merupakan keinginan dari reformasi Indonesia yang diilhami dan dilakukan oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia.Hal ini dilakukan sebagai akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh kekuatan militer dalam pemerintahan orde baru serta situasi dan kondisi bangsa yang dirasa sangat cocok apabila dilakukannya pemisahan tersebut.Apa yang terjadi sebelum reformasi 1998,terutama mengenai dwifungsi ABRI,memberikan kenangan buruk bagi rakyat Indonesia tentang arti dari militeristik yang senantiasa diusung sebagai alat kekuasaan dan bukan sebagai alat negara.[[3]](#footnote-3)

Substansi pokok yang tercermin dalam Tap MPR RI No.VI dan No.VII tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a) TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat Pertahanan NKRI dan Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, dan sebagai pelindung,pengayom dan pelayan masyarakat.

b) TNI yang membantu peran Polri dalam tugas Keamanan berdasarkan permintaan yang diatur oleh Undang-Undang dan Polri yang dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

c) Kedudukan TNI yang tunduk pada Peradilan Militer dan kedudukan Polri yang tunduk pada Peradilan Umum.

d) Peran TNI dan Polri yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih.

Peran TNI sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan keikutsertaan TNI dalam penyelenggaraan negara mencakup : Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas TNI, TNI bersikap netral dalam kehidupan politikdan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta mendukungtegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa Tap MPR itu baru merupakan aturan dasar, sudah barang tentu memerlukan penjabaran rinci yang lebih tegas dan jelas pada undang-undang operasionalnya termasuk tataran kewenangan yang akan menjadi payung hukum TNI, baik dalam melaksanakan fungsi pertahanan negara maupun dalam keikutsertaannya pada penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara selama ini, kita bertumpu pada perlawanan rakyat yang disusun dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yang lebih dikenal dengan istilah Sishankamrata. Pelajaran yang paling jelas tentang implementasi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini adalah perjuangan kemerdekaan periode 1945 sampai dengan 1949.

Pada masa itu, kekuatan rakyat bersenjata dan tidak bersenjata bangkit melawan penjajahan, dan berhasil mengusir penjajah Belanda. Tantangan yang kita hadapi saat ini adalah mencari wujud implementasi dalam tatanan negara modern atas segenap doktrin sistem dan tatanan yang kita warisi dari masa lalu sejak perjuangan fisik merebut kemerdekaan. Dalam kaitan ini Sishankamrata pada hakikatnya merupakan perwujudan sistem pertahanan semesta (*total defence*) atas segenap potensi dan sumber daya nasional guna dihadapkan kepada ancaman kelangsungan hidup bangsa. Peperangan di masa depan tidak akan pernah sama dengan peperangan yang lalu, walaupun prinsip-prinsip peperangan tetap berlaku. Perang masa depan akan dipengaruhi oleh apa yang dikenal dengan *Revolution in Military Affairs,* suatu medan perang yang ditandai dengan elemen-elemen *precision strike, information warfare, dominating maneuvers*, dan *space warfare.*

Ancaman bersenjata di masa mendatang akan ditandai dengan penggunaan keempat elemen tersebut secara terintegrasi. Karena itu, peperangan tidak dapat hanya bersandarkan pada kekuatan militer nyata yang eksis pada saat itu. Jaminan kemenangan dalam suatu perang diperoleh dari keunggulan militer, dan daya tahan atau kemampuan militer melakukan perang yang berkelanjutan.

Hal ini mempersyaratkan bahwa bangsa ini perlu memiliki kemampuan untuk memenuhi sendiri akan kebutuhan dasar alat peralatan perangnya dan mampu melipat gandakan kekuatan militernya sesuai dengan besar ancaman yang mungkin muncul. Dengan kemajuan bangsa sebagai hasil pembangunan, kesemestaan perang mendatang tidak menitikberatkan tumpuannya kepada kerakyatan semata tetapi akan lebih bersandar kepada kesemestaan segenap potensi yang dimiliki bangsa yaitu totalitas dukungan kemampuan negara di bidang teknologi, industri, sarana dan prasarana, maupun daya tahan hasrat rakyat mendukung angkatan bersenjatanya dalam penyelenggaraan perang. Karena itu, perang masa depan sangat tergantung dari kemampuan negara mewujudkan kesemestaan dalam mendukung pertahanan negara, pada seluruh lingkupnya. Inilah hakikat Sishankamrata, yang membedakan dari perwujudan Sishankamrata pada tahun 1945 ketikakesemestaan masih dipusatkan pada aspek rakyat sebagai“manpower”. Satu nilai yang tetap harus kita pertahankan adalah bahwa upaya pertahanan negara harus senantiasa diselenggarakan berdasarkan semangat cinta tanah air yang berkobar-kobar dan pantang menyerah.

Konsentrasi kekuatan militer Amerika Serikat kini telah beralih di sekitar wilayah Indonesia dan Asia Pasifik. Sudah barang tentu hal tersebut terkait dengan agenda-agenda penting AS berkenaan kebijakan politik, ekonomi, dan keamanannya. Meskipun kita belum mengetahui agenda tersembunyi dan sesungguhnya dari konsentrasi militer AS. Namun, saat ini dengan disimak dan pelajari beberapa alasan formal yang dikemukakan pihak militer AS dalam kunjungan pertamanya ke Jakarta. Panglima Komando Militer AS di Kawasan Pasifik (PACOM), Laksamana Samuel J. Locklear III menegaskan bahwa posisi Indonesia dan negara-negara lainnya di Asia Pasifik kini makin strategis di tengah perubahan dinamika kekuatan global. Itulah sebabnya AS dalam beberapa tahun terakhir menitikberatkan kepentingan keamanannya di Asia Pasifik.[[4]](#footnote-4)

Dalam kunjungan selama tiga hari di Indonesia ini, Locklear tidak hanya menemui para petinggi keamanan dan militer setempat. Dia juga merasa perlu menemui para cendekiawan, mahasiswa hingga jurnalis dalam suatu acara di Jakarta, Jumat 8 Februari 2013, untuk menjelaskan pandangannya soal pergeseran fokus keamanan AS ke Asia Pasifik, yang pertama kali diumumkan Presiden Barack Obama pada November 2011.

Locklear menyebut pergeseran fokus itu sebagai “Perimbangan Kembali (Rebalance) Peran AS di Asia Pasifik.” Dia menegaskan perimbangan yang dimaksud bukan bersifat konfrontatif atau untuk menyudutkan negara atau pihak tertentu. “Ini bukan hanya menyangkut militer tapi juga kebijakan, diplomasi, dan perdagangan. Perimbangan ini adalah suatu strategi kolaborasi dan kerjasama. Setelah mengakhiri perang di Irak dan Afganistan, AS menggeser fokus kepentingan keamanannya ke kawasan ini. Itulah sebabnya lebih dari setengah kekuatan militer laut AS kini ditugaskan beroperasi di kawasan yang terdiri dari beragam negara itu, termasuk Indonesia. Maka itu, tidaklah heran bila kini Laksamana Locklear memimpin komando gabungan militer terbesar yang dimiliki AS. Wilayah operasi PACOM meliputi Asia Pasifik, Asia Timur, dan Asia Selatan.

PACOM dibekali seperlima dari total kekuatan militer AS dan akan memimpin 60 persen dari armada Angkatan Laut Amerika. Saat ini, armada militer AS di Pasifik diperkuat oleh lima kapal induk dengan kekuatan pendukung, yaitu 180 kapal, 1.500 pesawat, dan 100.000 personel militer aktif.[[5]](#footnote-5)

Laksamana Locklear menjelaskan bahwa Indonesia termasuk mitra utama bagi AS dalam menjaga stabilitas di Asia Pasifik. Itulah sebabnya dalam kunjungan ke Jakarta, dia juga menegaskan perlunya pengembangan dan penguatan kerjasama keamanan antara AS dan Indonesia. Salah satu yang jadi prioritas kedua negara adalah kerjasama keamanan maritim. “Ini merupakan salah satu elemen yang penting bagi kedua negara, mengingat Indonesia berada di persimpangan dua lautan besar dan juga di salah satu jalur distribusi yang paling penting di dunia.

Banyak yang telah direncanakan pemerintah kedua negara untuk memperkuat kerjasama itu. “Begitu pula akan banyak latihan bersama dan juga latihan di tingkat multilateral yang makin meningkat,” kata Locklear. Dalam kunjungannya di Jakarta, dia mengatakan bahwa kerjasama antar militer kedua negara, terutama sejak 2005, juga semakin erat. “Ini juga termasuk pada kerjasama yang dijalin angkatan laut dari kedua negara. Mengingat letak Indonesia sebagai negara kepulauan di persimpangan yang strategis, kami berharap berbagai kerjasama, seperti berbagi informasi soal situasi keamanan di laut, bisa terus dikembangkan,” kata Locklear, yang menjadi Panglima PACOM sejak Maret 2012.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia dan Amerika Serikat sepakat mengembangkan dan memperdalam kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, khususnya kerja sama militer. Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Purnomo Yusgiantoro dan Wakil Menhan Amerika Ashton B. Carter, saat AS melakukan kunjungan kehormatan ke Kemenhan RI, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta (21-Maret-2013).[[6]](#footnote-6)

Kerja sama Pemerintah Indonesia dan Amerika dilakukan khusus untuk kerja sama militer, seperti latihan bersama, pendidikan dan pertukaran personel. Berkenaan dengan kerja sama tersebut, pihak Indonesia menginginkan adanya peningkatan kerja sama di bidang alutsista, seperti pengembangan proyek *Foreign Military Sales* (FMS) untuk mendukung proses modernisasi peralatan TNI.

Mulai semester I pada tahun 2014 sesuai dengan rancang bangun kekuatan pertahanan pada renstra I (2010-2014) TNI Angkatan Udara diharapkan telah diperkuat dengan beberapa Alutsista Dirgantara baru yang lebih kompleks dan canggih. Hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya yang terus dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI yang melibatkan beberapa pihak seperti pelaku industri Pertahanan, kalangan akademisi dan tenaga-tenaga ahli lainnya. Sehubungan upaya pemenuhan Alutsista terbaru dan canggih ini Kemhan akan meng-upgrade sekitar 24 unit pesawat [F-16](http://fighteraircraftpics.blogspot.com/2013/08/f-16-fighting-falconmulti-role-fighter.html) dengan Engine Block 25 menjadi Engine blok 52. 24 unit pesawat ini merupakan hasil hibah dari Pemerintah Amerika Serikat yang telah juga disetujui oleh Anggota Komisi I DPR RI. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung upgrade tersebut sekitar 600 juta Dollar. Selain itu Kemhan juga akan melibatkan beberapa pihak termasuk tenaga ahli dari kalangan akademisi, peneliti serta kalangan pelaku industri pertahanan dalam negeri.[[7]](#footnote-7)

Wakil menteri pertahanan AS beranggapan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang paling dinamis. Sehingga Amerika merasa optimis jika kerja sama dengan Indonesia bisa dilaksanakan lebih baik maka akan mempengaruhi kerja sama secara menyeluruh antara Amerika dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan penulis ketengahkan dalam penelitian ini, lebih menekankan kepada kerjasama-kerjasama dalam bidang militer antara Indonesia-Amerika Serikat dalam konteks postur pertahanan dan keamanan Indonesia di Asia Tenggara.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji, mencermati dan mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan penelitian dengan mendeskripsikan kepada judul skripsi: **KERJASAMA MILITER INDONESIA-AMERIKA SERIKAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP POSTUR PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA DI ASIA TENGGARA**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerjasama militer Indonesia-Amerika Serikat terkait dengan ancaman di kawasan Asia Tenggara?
2. Sejauhmana kerjasama militer Indonesia-Amerika Seriakt dapat membentuk postur militer Indonesia di Asia Tenggara?
3. Hal-hal apa saja yang terkait dengan kerjasama militer Indonesia-Amerika Serikat dalam menghadapi segala bentuk ancaman?
	* 1. **Pembatasan Masalah**

Karena luasnya permasalahan, penulis membatasi masalah pada indikator kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam bidang militer serta pengaruhnya terhadap perkembangan pertahanan keamanan Indonesia dalam kurun waktu 2008-2013.

* + 1. **Perumusan Masalah**

 Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“**Bagaimana kerjasama militer Indonesia-Amerika Serikat berpengaruh terhadap postur pertahanan dan keamanan Indonesia di Asia Tenggara?**”**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
		1. **Tujuan Penelitian:**
1. Untuk mengetahui bagaimana kerjasama militer Indonesia-Amerika Serikat terkait dengan ancaman di kawasan Asia.
2. Untuk mengetahui sejauhmana kerjasama militer Indonesia-Amerika Seriakt dapat membentuk postur militer Indonesia di ASEAN.
3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang terkait dengan kerjasama militer Indonesia-Amerika Serikat dalam menghadapi segala bentuk ancaman.
	* 1. **Kegunaan Penelitian:**
4. Dengan penelitian ini, diharapkan akan memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai teori-teori yang berhubungan dengan masalah internasional serta melatih kemampuan berpikir dan menganalisis suatu permasalahan.
5. Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara tercinta sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi mereka yang membutuhkan.
6. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh ujian strata-1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
	1. **Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**
		1. **Kerangka Pemikiran**

Di dalam pergaulan internasional setiap negara tidak bisa melepaskan diri dari hubungan antar negara yang melintasi batas negara dimana setiap negara memiliki masalah yang begitu kompleks dengan negara lain, juga memiliki potensi yang sangat besar terhadap kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Untuk itu diperlukannya hubungan yang komprehensif dimana memiliki tingkat kesepahaman antara negara yang satu dengan negara yang lainnya, karena hubungan tersebut sangat kompleks dimana setiap segi dari hubungan ini memerlukan koordinasi yang tidak sederhana, karena bangsa lain juga memiliki kadaulatan. Suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain bisa menimbulkan konflik karena pada umumnya setiap negara yang terlibat dalam menjalin hubungan mempunyai kepentingan untuk mengejar kepentingan nasional masing-masing negara. Terlibatnya suatu negara dalam masalah didasarkan apabila negara tersebut mempunyai hubungan secara historis dengan negara yang sedang mempunyai konflik dan juga negara tersebut mempunyai kepentingan nasional. Hubungan internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan konflik (*conflict*) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya.

Definisi dari Hubungan Internasional juga dikemukakan oleh KJ. Holsti dalam buku *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda sebagai berikut:

“Istilah Hubungan Internasional mengacu kepada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun tidak, hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses antar bangsa menyangkut segala hubungan itu”.[[8]](#footnote-8)

Dalam pembahasan yang berhubungan dengan masalah internasional diperlukan suatu konsep dan teori sebagai landasan berpikir. Untuk itu masalah Internasional tidak mungkin begitu saja meninggalkan sistem internasional. KJ. Holsti mengemukakan sistem internasional dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda:

“Sistem Internasional dapat didefinisikan sebagai kumpulan kesatuan politik uang independen seperti suku, negara, kota, bangsa dan kerajaan, yang berinteraksi dalam frekuensi tinggi dengan proses yang teratur, para pengkaji mempunyai pengertian untuk menjelaskan keistimewaan atau karakteristik prilaku unit politik tersebut satu sama lain dengan menerangkan berbagai perubahan besar dalam interaksinya”.[[9]](#footnote-9)

 Dalam Kaitan ini politik luar negeri suatu negara tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kepentingan nasional bangsa tersebut, karena kepentingan nasional merupakan salah satu terbentuknya suatu kebijakan politik luar negeri. Cina mempunyai kebijakan politik luar negeri dimana Cina dalam hal ini lebih menekankan pada kekuatan dalam negerinya untuk menguatkan unsur domestiknya khususnya pada pertahanan dan keamanan juga ekonomi. Dalam hal ini Miriam Budiarjo dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik* menjelaskan arti dari kebijakan, sebagai berikut: “Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu”.[[10]](#footnote-10)

 Sedangkan menurut Paul Scabury dalam bukunya *Power, Freedom and Diplomacy* yang dikutip oleh KJ. Holsti dalam bukunya *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis* bahwa yang dimaksud tujuan nasional, adalah:

“Istilah tujuan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita atau tujuan suatu bangsa....... yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, bahwa pengertian ini merupakan konsep umum tujuan nasional dan bersifat normatif. Pengertian lain yang bersifat deskriptif tujuan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah”.[[11]](#footnote-11)

 Perkembangan keadaan Internasional akan mempengaruhi kebijakan politik luar negeri suatu negara baik itu kebijakan politik, ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan dan keamanan. Dari uraian di atas, jelas bahwa politik luar negeri suatu negara merupakan dasar bagi posisi dan sikap masing-masing negara atau kelompok-kelompok negara dalam Hubungan Internasional mereka.

Koesnadi Kartasasmita mendefinisikan kerjasama secara lebih terfokus kedalam kerjasama internasional adalah sebagai berikut:

“Kerjasama internsional terjadi karena “*nation understanding*” di mana mempunyai arah dan tujuan yang saling membutuhkan. Kerjasama itu di dasari oleh kepentingan bersama di antara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.”[[12]](#footnote-12)

Dalam rangka menganalisa perkembangan isu di dalam ilmu Hubungan Internasional, maka terdapat beberapa pradigma yang digunakan sebagai landasan. Sebagai salah satu paradigma tertua dalam hubungan internasional, paradigma Realisme menaruh perhatian utamanya pada ancaman keamanan tradisional (militer) dimana aktor negara menghadapi ancaman tersebut melalui pembangunan kapabilitas militernya demi mencapai kepentingan nasionalnya (keamanan nasional) dimana stabilitas yang tidak terbatas pada permasalahan keseimbangan (equilibrium) kerap mendominasi kepentingan nasional atas keamanannya. Atas dasar pijakan tersebut, maka sudut pandang tersebut menjadi faktor pendorong utama mengenai bagaimana suatu negara bertindak dalam pergaulan internasional.[[13]](#footnote-13)

Buzan & Wæver mengemukakan bahwa:

*“The central idea in RSCT (Regional Security Complex Theory) is that, since most threats travel more easily over short distances than long ones, security interdependence is normally into regionally based clusters: security complexes. […] Process of securitization and thus the degree of security interdependence are more intense between actors inside such complexes than they are between actors inside the complex and outside of it.”[[14]](#footnote-14)*

Dari teori yang dikemukakan oleh Buzan tersebut, tergambar bahwa ancaman yang ada semakin mudah menyebar baik pada jarak dekat maupun pada jarak yang jauh sekalipun. Oleh karena itu, interdependesi keamanan dalam suatu kawasan pun terjadi, sehingga menjadikan keamanan tersebut menjadi semakin kompleks. Hal ini menyebabkan meningkatnya hubungan antar aktor yang terlibat baik secara langsung di dalam kompleksitas tersebut maupun aktor yang terlibat di luar kompleksitas keamanan yang ada.

Adapun pengertian kawasan menurut Louis J. Cantory dan Steven L. Spiegel dalam bukunya *The International Politics of Region* yang dikutip T. May Rudy dalam bukunya *Studi Kawasan Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia* sebagai berikut:

“Kawasan dapat diartikan suatu wilayah di dunia, dimana terdapat kedekatan negara secara geografis, aktifitas anggota kawasan (baik kerjasama ataupun pertentangan) menjadi suatu hal yang menentukan kebijakan luar negeri masing-masing kawasan tertentu mungkin mempunyai kemampuan ekstra regional. Prioritas utama keterlibatan dalam hubungan luar negeri adalah dengan kawasan yang ditempatinya. Dalam kondisi normal mereka tidak dapat mencapai keberhasilan dimanapun tempat mereka meraih dan mempertahankan posisi permanen di wilayah mereka sendiri”(dalam terjemahan).[[15]](#footnote-15)

Sedangkan pengertian keamanan nasional menurut Lawrence Ziring dalam bukunya *International Relations: A Political Dictionary* yang diterjemahkan oleh T. May Rudy dalam bukunya *Studi Strategis; Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin* sebagai berikut:

“Keamanan nasional adalah pengalokasian sumber-sumber untuk produksi, implementasi, dan pelaksanaan atas apa yang disebut sebagai fasilitas koersif yang digunakan suatu negara dalam mencapai kepentingan-kepentingannya”.[[16]](#footnote-16)

 Sedangkan menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya *Politik AntarBangsa*, menyatakan:

“Masalah keamanan bukan lagi urusan negara sendiri-sendiri yang harus ditanggulangi dengan persenjataan dan beberapa unsur lain dari kekuatan nasional. Keamanan menjadi urusan semua negara yang akan memelihara bersama keamanan setiap negara, seperti seandainya kemanan sendiri sedang terancam”.[[17]](#footnote-17)

Konsep keamanan nasional mengalami perubahan interpretasi terutama pasca perang dingin, sebagai akibat globalisasi dan meningkatnya proses demokratisasi. Terhadap fenomena globalisasi dan demokratisasi tersebut, amat menarik untuk mengacu pada kerangka perspektif studi hubungan internasional yang melahirkan konsep keamanan nasional (*national security*) berbeda atas dua perspektif mainstream, yaitu:

1). Perspektif realisme yang berbicara keamanan tradisional, Perspektif realisme dalam studi hubungan internasional menyatakan bahwa keamanan nasional merupakan sebuah kondisi yang terbebas dari ancaman militer atau kemampuan suatu negara utuk melindungi negara bangsanya dari serangan militer yang berasal dari lingkungan eksternal.

Dampak cara berpikir perspektif tersebut adalah terjadinya pengembangan kekuatan militer oleh pemerintah di negara bersangkutan, beban anggaran militer yang besar, besarnya pengaruh militer dalam politik domestik dan internasional, dan terjadinya militerisasi masyarakat sipil.

2) Perspektif neo-realisme tentang keamanan non-tradisional / non konvensional. Perspektif neo-realisme mengubah cara pandang tentang keamanan tradisional ke pemahaman baru yang disebut sebagai konsep keamanan non-tradisional atau keamanan non-konvensional. Dalam konteks ini keamanan tidak lagi diletakkan dalam kerangka *high politics (*militer) dan *power*, namun sebagai masalah moral dan kemanusiaan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan perubahan konsep dan fokus keamanan dari keamanan yang menitikberatkan pada konteks negara ke keamanan masyarakat, dari keamanan melalui kekuatan meliter ke keamanan melalui pembangunan, dari keamanan wilayah ke keamanan manusia (*human security*).

Makna Keamanan nasional dalam arti luas adalah kondisi kehidupan nasional yang bebas dari berbagai ancaman baik militer maupun non militer, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Keamanan nasional akan dapat diwujudkan dengan melaksanakan penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara. Fungsi Pertahanan dan Keamanan ( Hankam ) diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman meliputi sub fungsi pertahanan, sub fungsi keamanan dalam negeri dan sub fungsi keamanan ketertiban masyarakat. Keseluruhannya diselenggarakan melalui manajemen damai, manajemen krisis dan manajemen perang, sesuai dengan ekskalasi ancamannya. Di dalam setiap fungsi tersebut semua kekuatan nasional mempunyai peran pelibatan sesuai tugas dan fungsinya secara terpadu dan sinergis.

Pertahanan dan keamanan adalah salah satu fungsi pemerintahan untuk menghadapi dan meniadakan segala ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sebagai suatu sistem yang menempatkan pertahanan dan keamanan negara sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga negara dengan hak dan kewajiban yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Hakekat pertahanan dan keamanan negara adalah pembentukan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Kebijakan bidang Hankam untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai satu kesatuan Hankam, harus mencerminkan faktor-faktor sebagai berikut; (1) kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) prinsip-prinsip humaniter; (3) keterpaduan strategi penangkalan, perdamaian dan pertahanan aktif; (4) konsep integrated armed forces; dan (5) penggunaan kekuatan bersenjata hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir apabila upaya damai ( diplomasi) menemui kegagalan.

Kebijakan Hankam juga mencakup perwujudan keamanan menyeluruh (*comprehensive security*) yang menempatkan keamanan sebagai konsep multidimensional sehingga mengharuskan negara menyiapkan beragam institusi keamanan untuk mengelolanya. Institusi keamanan tersebut masing-masing memiliki fungsi dan tugas spesifik untuk menangani dimensi keamanan yang spesifik pula. Institusi-institusi keamanan yang harus disiapkan oleh negara yaitu TNI, POLRI, komunitas intelijen negara, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, polisi pamong praja, polisi-polisi khusus, DLLAJR dan institusi lainnya.

Pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi [ancaman militer](http://id.wikipedia.org/wiki/Ancaman_militer), tersusun dalam [komponen utama](http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_utama) serta [komponen cadangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Komponen_cadangan) dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pertahanan militer sebagai kekuatan bersenjata ditampilkan melalui SDM dan Alutsista, dibangun, dan dikembangkan secara profesional untuk mencapai tingkat kekuatan sampai pada standar penangkalan. Namun, pembangunan kekuatan pertahanan negara harus dipersiapkan untuk menghadapi setiap ancaman militer yang sewaktu-waktu dapat timbul.

Upaya penangkalan tidak bersifat pasif, tetapi dikembangkan dalam suatu strategi penangkalan yang memiliki sifat dinamis, melalui kesiapsiagaan kekuatan pertahanan untuk menghadapi kondisi terburuk, yakni menghadapi ancaman aktual dalam bentuk perang atau bentuk ancaman militer lainnya. Dalam konteks “menghadapi ancaman militer”, kekuatan pertahanan yang dimiliki didayagunakan untuk mengatasi situasi negara yang terancam oleh suatu serangan militer dari negara lain, atau sedang diperhadapkan dengan adanya jenis ancaman yang akan mengganggu kepentingan nasional.

Rasa aman di semua aspek kehidupan yaitu tata kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam bukanlah tanggungjawab pemerintah saja, akan tetapi menjadi kewajiban seluruh rakyat, dan oleh karena itu maka sistem pertahanan dan keamanan yang kita susun dinamakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), karena di dalamnya terkandung unsur kerakyatan di dalam orientasinya yang berarti masalah Hankam diabdikan kepada dan oleh rakyat, unsur kesemestaan di dalam pelibatannya berarti seluruh potensi serta kemampuan nasional pada saat dibutuhkan harus dilibatkan dalam upaya Hankamneg dan unsur kewilayahan di dalam gelarnya berarti untuk mengupayakan optimasi konfigurasi geografi kita tidak disandarkan kepada satu epicenter kekuatan, akan tetapi merata ke seluruh wilayah nasional.

Amerika Serikat telah menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia, termasuk meliputi sektor keamanan maritim. Beberapa negara lain juga menjalin kemitraan serupa, seperti China, Korea Selatan, dan Jepang. “Bahkan Uni Eropa pun ingin menjalin kerjasama dengan kita.

Betapa pentingnya perairan-perairan Indonesia bagi perdagangan dan pelayaran internasional. “Setiap tahun, 63 ribu kapal melintas Selat Malaka; 3.500 di Selat Sunda, dan 3.900 di Selat Lombok.” Di Selat Malaka, tonase kapal-kapal dagang yang melintas setiap tahun mencapai 525 juta ton dengan nilai US$390 miliar, di Selat Sunda sebanyak 15 juta ton dengan nilai total US$5 miliar, sedangkan di Selat Lombok sebanyak 140 juta ton senilai US$40 miliar.Hal tersebutlah yang membuat Indonesia punya peran esensial dalam mempertahankan keamanan maritim di Asia Pasifik, begitu pula dengan perdagangan dan pelayaran global.

 Berdasarkan uraian sebelumnya maka peneliti menyusun 3 (tiga) buah asumsi seperti di bawah ini:

* 1. Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bidang militer untuk memperkuat pertahanan nasionalnya.
	2. Kerjasama militer Indonesia-AS dilakukan untuk kepentingan nasional masing-masing negara.
	3. AS merasa posisi Indonesia merupakan negara yang strategis dalam hal kemanan dan pertahanan di Asia Tenggara pada khususnya dan Asia Pasifik pada umumnya.
		1. **Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **Jika kerjasama militer antara Indonesia-Amerika Serikat dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang meliputi hal-hal yang terkait dengan postur militer yaitu alutsista, latihan militer, military budget, serta jumlah pasukan yang kuat, maka Indonesia dapat memanfaatkan secara maksimal untuk mencegah dan menangani berbagai macam ancaman.**

* + 1. **Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Indikator** | **Verifikasi** |
| Variabel bebas:**kerjasama militer antara Indonesia-Amerika Serikat dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang meliputi hal-hal yang terkait dengan postur militer yaitu alutsista, latihan militer, military budget, serta iumlah pasukan yang kuat** | 1. Alutsista
2. Latihan Militer
3. Military Budget
4. Jumlah Pasukan
 | 1. Perkembangan Alutsista Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara
2. Latihan Militer gabungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat.
3. Peningkatan jumlah budget untuk perbaikan alutsista Indonesia, sedangkan military budget Amerika Serikat sngat besar
4. 129,075,188 jumlah personel militer Indonesia
 |
| Variabel terikat:**Indonesia dapat memanfaatkan secara maksimal untuk strategi pertahana dan keamanan Indonesia.** | 1. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia
2. Kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia
 | 1. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang di topang oleh unsur-unsur militer Indonesia
2. Kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia untuk menghadapi gangguan Regional dan Internasional
 |

* + 1. **Skema Kerangka Teoritis**

AS

Indonesia

Kepentingan AS di Asia Pasifik

Kerjasama antara Indonesia-AS dalam bidang militer

Sistem pertahanan semesta

Modernisasi Militer

Pendidikan Militer

Teknologi Militer

Industri Militer

Postur Pertahanan dan Keamanan Indonesia

* 1. **Tingkat Analisis, Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
		1. **Tingkat Analisis**

Analisis Induksionis, yang unit analisanya pada tingkatan yang lebih tinggi.

* + 1. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dan metode historis analitis.

a. Metode deskriptif analitis, yaitu metode yang digunakan untuk mendefinisikan fenomena yang ada dan membahas realita yang ada serta berkembang dewasa ini kendati yang setuju pada pencarian alternatif untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metode ini pada akhirnya akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realita masa yang akan datang. Metode deskriptif analitis menggambarkan, mengklarifikasi, menelaah, serta menganalisis fenomena yang ada didasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dalam masalah yang bersifat aktual di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara rinci fenomena sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masalah dalam prakteknya tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data, melainkan meliputi juga analisis dari interpretasi data-data tersebut.

* + 1. Metode historis analitis, yaitu metode penelitian yan menghasilkan metode pemecahannya yan ilmiah dan perspektif historis suatu masalah, yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cara pengumpulan data dan fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lampau dalam hubungannya dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidak terputus dan saling berhubungan satu sama lain. Metode penelitian in digunakan untuk mengungkapkan peristiwa masa lalu, metode ini ditarik kesimpulannya untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokkan dengan kondisi yang tengah terjadi pada saat ini serta juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan prediksi-prediksi masa yang akan datang.
		2. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan penelaahan literatur atau referensi baik yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, surat kabar, jurnal, buletin-buletin, internet, maupun catatan-catatan penting mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

* 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
		1. **Lokasi Penelitian**
			1. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Jl. Sisingamangaraja No. 73-75 Jakarta.

* + - 1. Kedutaan Besar Cina

Jl. Mega Kuningan No. 2 Jakarta

* + - 1. Center For Strategic International Studies (CSIS)

Jl. Tanah Abang III/23-27 Jakarta.

* + - 1. Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Departemen Luar Negeri RI

Jl. Taman Pejambon No. 4 (ex-BP7) Jakarta Pusat

* + - 1. Pusat Informasi Kompas

Jl. Palmerah Selatan No. 23-28 Jakarta

* + - 1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lipi)

Jl. Gatot Subroto No. 10 Jakarta.

**1.6.2 Lamanya Penelitian**

 Penulis melakukan penelitian diperkirakan sejak bulan Desember 2009 sampai Mei 2010. Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikutnya.

**G. Sistematika Penulisan**

**BAB II**  KERJASAMA MILITER INDONESIA-AMERIKA SERIKAT

Bab ini menguraikan tentang kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan AMERIKA SERIKAT

**BAB III** SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN INDONESIA

Bab ini dikhususkan untuk membahas tentang system pertahanan dan keamanan Indonesia

**BAB IV** PENGARUHKERJASAMA INDONESIA-AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANGMILITER TERHADAP PERTAHANAN INDONESIA

Dalam bab ini akan dibahas mengenaipengaruh kerjasama militer antara kedua Negara terhadap Postur pertahanan dan keamanan Indonesia

**BAB V** KESIMPULAN

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang perlu memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang dipandang perlu, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran mengenai data yang berhubungan dengan materi yang diambil.

1. Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1996) hlm. 53. [↑](#footnote-ref-1)
2. Koentjaraningrat, *Antropologi Sosial* (Jakarta : Aneka, 1999) hlm 106. [↑](#footnote-ref-2)
3. http://akpol2004.blogspot.com/2012/01/sistem-keamanan-nasional-dalam.html [↑](#footnote-ref-3)
4. http://www.arrahmah.com/news/2013/02/09/alasan-militer-as-pusatkan-kekuatan-di-indonesia-dan-asia-pasifik.html [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid [↑](#footnote-ref-5)
6. http://jaringnews.com/internasional/asia/36929/as-indonesia-siap-mempererat-kerja-sama-militer [↑](#footnote-ref-6)
7. http://fighteraircraftpics.blogspot.com/2013/09/2014-alutsista-baru-dan-canggih-untuk.html [↑](#footnote-ref-7)
8. K.J Holsti, Politik Internasional; Suatu Kerangka Analisis, Bina Cipta, Bandung, 1987 hal 26-27. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid, hal 35. [↑](#footnote-ref-9)
10. Prof. Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 8. [↑](#footnote-ref-10)
11. K.J Holsti, Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis, Binacipta, Bandung, 1987, hal 86. [↑](#footnote-ref-11)
12. Koesnadi Kartasasmita, Organisasi Internasional, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hal. 19. [↑](#footnote-ref-12)
13. Liselotte Odgard, The Balance of Power In Asia-Pacific Security,London, 2006, [↑](#footnote-ref-13)
14. Buzan & Wæver, Region and Powers the Structure of International Security,2003 hal 4. [↑](#footnote-ref-14)
15. T May Rudy, Studi Kawasan Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik di Asia, Bina Budhaya Bandung, Bandung, 1997, hal 1. [↑](#footnote-ref-15)
16. . Lawrence Ziring, *International Relation: A Political Dictionary*, yang diterjemahkan oleh T May Rudy dalam buku, Studi Strategis; Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 64-65. [↑](#footnote-ref-16)
17. . Hans J Morgenthau, Politik Antarbangsa, Binacipta, Bandung, 1991, hal 487-488. [↑](#footnote-ref-17)